

Generasi Antara: Refleksi tentang Studi Pemuda Indonesia

Suzanne Naafs dan Ben White*

Tulisan ini menyajikan tinjauan reflektif tentang studi pemuda Indonesia. Bagian utamanya membahas sejumlah ide kunci tentang pemuda, terbagi dalam tiga subbagian utama yaitu tentang “pemuda sebagai generasi”, “pemuda sebagai transisi” dan “pemuda sebagai pencipta dan konsumen budaya”.

Kata kunci: Pemuda; Generasi; Transisi Pemuda; Budaya Pemuda; Indonesia.

Pendahuluan¹

Tulisan ini menyajikan tinjauan reflektif terhadap berbagai kajian tentang pemuda di Indonesia. Salah satu kekuatan penting bidang studi kepemudaan seiring perkembangan yang terjadi dalam beberapa dekade belakangan adalah keteguhan terus-menerus bahwa kita mengkaji pemuda itu sendiri dan dalam perspektif mereka, dengan demikian mendatangkan otonomi tertentu bagi kajian pemuda yang sebelumnya tersembunyi dalam disiplin-disiplin “terapan” seperti kriminologi, kerja sosial, kajian kesehatan dan keluarga. Teori-teori yang ada saat ini tentang pemuda mendekati kajian tentang orang muda dalam banyak cara menarik dan kaya, termasuk kepemudaan sebagai transisi, kepemudaan sebagai identitas, kepemudaan sebagai aksi, kepemudaan sebagai praktik budaya, dan pemuda sebagai pencipta budaya (Jones 2009). Selain perspektif-perspektif tersebut kami juga akan mengemukakan tentang pentingnya sebuah pendekatan relasional, memandang pemuda sehubungan dengan dinamika hubungan mereka dengan pihak lain (orang dewasa) dalam struktur besar reproduksi sosial. Pengertian tentang “generasi” (Alanen 2001) sangat penting dalam pendekatan ini.

Konstruksi sosial dan ilmiah kepemudaan cenderung memandangnya sebagai periode “transisi”—dari anak-anak menuju masa dewasa, dari pendidikan menuju pekerjaan, dari keluarga asal ke keluarga tujuan (misalnya, Lloyd 2005, Roberts 2009). Begitu pula yang terjadi dengan literatur kebijakan, seperti dalam laporan Bank Dunia tentang *Pembangunan dan Generasi Mendatang* (World Bank 2006) yang memandang kepemudaan sehubungan

* Suzanne Naafs adalah kandidat Ph.D. pada *International Institute of Social Studies*, Universitas Erasmus Rotterdam. Ben White adalah Profesor Emeritus Sosiologi Pedesaan pada Institut yang sama.

dengan transisi-transisi kait-mengait ini. Akan tetapi penting untuk dipahami bahwa orang muda tidak mesti memandangi diri mereka dengan cara seperti itu, atau hanya dengan cara itu. Sering kali mereka sibuk mengembangkan budaya dan identitas anak muda sendiri, misalnya berusaha tampak berhasil di mata rekan-rekan sebaya mereka sebagai *pemuda* (bukan sebagai calon dewasa) dan bukan berusaha menyiapkan diri menjadi orang dewasa yang berhasil. Dengan kata lain “transisionalitas” yang menjadi dimensi kunci kategorisasi konvensional kepemudaan boleh jadi bukan merupakan dimensi dominan identitas pemuda.

Kajian-kajian pemuda Indonesia dalam banyak hal mengikuti pola dan kecenderungan umum bidang lebih luas kajian pemuda. Kajian-kajian itu cenderung lebih banyak terfokus pada pemuda urban, khususnya di ibu kota maupun kota-kota besar metropolitan; mereka terutama sangat meminati orang muda laki-laki—kadang-kadang secara implisit menyamakan “pemuda” dengan “laki-laki muda”—kecuali dalam bidang-bidang kajian terbatas tertentu seperti seksualitas. Dalam tahun-tahun belakangan kajian-kajian itu menunjukkan minat besar pada budaya dan gaya hidup pemuda, dan kurang menunjukkan minat pada aktivitas dan kepentingan praktis dan material orang muda (misalnya, dalam transisi sekolah-kerja dan pengangguran atau setengah pengangguran pemuda). Di antara banyak peneliti Indonesia serta beberapa peneliti asing terdapat fokus yang kuat pada “defektologi kepemudaan”—apa yang salah dengan pemuda bangsa, apa yang harus dilakukan untuk “membenahi”—sebagai kontribusi terencana bagi kebijakan (yaitu “tata kelola” kepemudaan yang lebih baik), sebuah kecenderungan yang belum diimbangi dengan eksplorasi kritis tata kelola pemuda sebagai sebuah dimensi “sikap pemerintahan” (*governmentality*) Indonesia kontemporer.

Bagian utama tinjauan ini disusun di sekitar sejumlah ide kunci tentang dimensi-dimensi kepemudaan meliputi: pemuda sebagai generasi (hubungan pemuda-orang dewasa, pemuda dan perubahan sosial/politik, pemuda dan negara); kepemudaan sebagai identitas; pemuda sebagai pencipta dan konsumen budaya (termasuk bahasa, gaya hidup, pemuda dan media baru, identitas dan praktik agama); kepemudaan sebagai transisi (dari sekolah ke kerja, dari keadaan bergantung ke otonomi, mobilitas pemuda, dan lain sebagainya, termasuk mengatasi/merespons “problem” transisi); serta pemuda dan “perilaku berisiko” (kesehatan, seksualitas, narkoba, kriminalitas, kekerasan, problem “defektologi” pemuda). Kami tidak memberikan bagian khusus pada isu-isu lintas batas seperti gender dan agama tetapi berusaha memasukkan dimensi-dimensi ini, jika relevan, dalam tiap bagian. Kami mengelompokkan

ide-ide ini ke dalam tiga bagian utama, tentang “pemuda sebagai generasi”, “kepemudaan sebagai transisi”, dan “pemuda sebagai pencipta dan konsumen budaya”.

Pemuda sebagai Generasi

Orang muda adalah aktor kunci dalam sebagian besar proses perubahan ekonomi dan sosial. Mengambil contoh dari Indonesia, dua tema penting dalam kajian-kajian makro perubahan sosial adalah proses urbanisasi (pergerakan spasial populasi) dan de-agrarianisasi (pergeseran sektoral dalam pekerjaan). Sering dilupakan bahwa kedua pergeseran ini umumnya dilakukan oleh pemuda. Pemuda dan bukan orang tua yang pindah ke kota mencari pekerjaan, pemuda jugalah yang memutuskan bahwa masa depan mereka bukan di bidang pertanian.²

Walaupun definisi PBB tentang “pemuda” biasanya mencakupi mereka yang berusia 15–24 tahun (bertumpang tindih membingungkan dengan “anak” yang meliputi usia 0–17 tahun), peraturan perundang-undangan Indonesia (seperti halnya di beberapa negara lain Asia, Afrika dan Amerika Latin) memperpanjang batas formal “pemuda” hingga usia yang mengherankan. Undang-undang baru tentang kepemudaan mendefinisikan pemuda sebagai “warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun” (UU No. 40 Tahun 2009, Pasal 1.1).³ Alasan-alasan penguluran batas “pemuda” hingga tigapuluh tidak dijelaskan dalam Undang-Undang atau “naskah akademik” yang menyertainya di sepanjang proses pembahasan legislatif yang, pada mulanya (seperti dalam Rancangan Undang-Undang) menetapkan rentang umur 18 – 35 tahun (Menpora, tanpa tahun, h. 30, 36). Yang jelas, ini sejalan dengan banyak pemerintah negara sedang berkembang lain yang menetapkan batas akhir pemuda hingga 35 atau bahkan 40 tahun.⁴

Definisi diperpanjang kepemudaan ini dapat menyebabkan kebingungan bagi mereka yang melihat statistik untuk mengetahui indikator negara tentang pemuda bangsa. Misalnya, menggunakan data yang sama dari Biro Pusat Statistik tetapi dengan rentang usia berbeda, Kementerian Pemuda—menggunakan definisi 18–35 dalam Rancangan Undang-Undang—mendapati hanya 12 persen pemuda perkotaan dan 20 persen pemuda desa yang menganggur, sementara Organisasi Buruh Internasional (ILO) menggunakan definisi 15–24 PBB mendapati bahwa 23 persen pemuda perkotaan dan 33 persen pemuda desa menganggur (Menpora 2008, Indonesia Youth Employment Network 2004). Bahkan, definisi yang

diperpanjang mencakup sebuah kelompok umur yang sebagian besar anggotanya sudah melewati penanda utama “transisi menuju masa dewasa”: menggunakan definisi Kementerian hanya 7 persen pemuda (18–35) yang masih menempuh pendidikan, 70 persen sudah bekerja dan 50 persen pemuda serta 69 persen pemuda sudah menikah. Ini menunjukkan bahwa dasar utama bagi definisi diperpanjang ini bersifat politis. Undang-Undang tentang Kepemudaan yang sama mendefinisikan “kepemudaan” (keadaan atau kondisi muda, sama dengan “masa kanak-kanak” atau “kedewasaan”) sebagai “berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.” (UU No. 40 Tahun 2009, Pasal 1.2).

Kaum muda punya konsepsi sendiri tentang masa muda—sejauh yang bisa dipetik dari beberapa kajian soal ini—yang nampaknya mengaitkan transisi dari “anak” ke “remaja” atau pemuda dengan kemampuan menilai mana yang salah mana yang benar, dan transisi dari pemuda ke dewasa dengan kemandirian ekonomi dari generasi orang tua.⁵

Salah satu perubahan penting yang terjadi pada masa muda di Indonesia, seperti di banyak negara lain, adalah perpanjangannya. Ketika orang muda menempuh pendidikan lebih panjang, rata-rata usia awal perkawinan mereka naik dan waktu memasuki dunia kerja diulur, makin lama mereka berada dalam keadaan setengah atau sepenuhnya bergantung pada generasi orang tua yang untuk kebanyakan orang merupakan bagian dari karakteristik penentu kepemudaan, artinya sudah matang secara biologis tetapi dengan masa dewasa (sosial) ditangguhkan. Batas-batas kepemudaan juga bersifat spesifik kelas. Misalnya, banyak laki-laki atau perempuan kelas menengah perkotaan di akhir usia dua puluhan mereka, masih lajang dan tinggal bersama orang tua mereka, menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi dan belum memasuki dunia kerja profesional akan menganggap diri (dan dipandang sebagai) “pemuda” sedangkan laki-laki dan perempuan lain yang masih menginjak awal dua puluhan, tetapi sudah keluar dari sekolah pada usia 15 tahun atau sebelumnya, sudah bekerja sebagai buruh atau pedagang pasar selama beberapa tahun, dan sudah menikah dengan dua atau tiga anak, akan menganggap diri mereka (dan dipandang sebagai) “dewasa” oleh masyarakat mereka.

Gagasan tentang “generasi”, disorot dalam esai klasik Karl Mannheim *The Problem of Generations* (1952, edisi aslinya 1928) mengilhami banyak karya tentang kajian pemuda sehubungan dengan perubahan sosial (misalnya, Corsten 1999, Mayall 2002, Bab 3). Inilah salah satu gagasan disertasi Juliette Koning tentang “generasi-generasi perubahan” di sebuah

desa Jawa (Koning 1997, 2004). Sesungguhnya ada tiga makna penting “generasi” yang tetapi saling berkaitan. Yang pertama adalah pengertian murni demografis untuk suatu kelompok umur (didefinisikan secara biologis). Yang kedua menyorot dimensi-dimensi relasional, ketika pemuda didefinisikan tidak hanya dengan perbedaan-perbedaan antara mereka dan orang dewasa tetapi juga oleh bentuk-bentuk tertentu hubungan pemuda-orang dewasa (Alanen 2001). “Generasi” dalam pengertian kedua ini adalah konsep fundamental bagi kajian pemuda, bukan sebagai kategori deskriptif belaka tetapi sebagai konsep teoretis menerangkan dimensi relasional dan fenomena struktural—setara dengan konsep kelas, gender, etnisitas, dan lain sebagainya, dalam ilmu-ilmu sosial. Ini menyediakan suatu cara memahami struktur yang memisahkan pemuda dari kelompok-kelompok sosial lain, dan menjadikan mereka sebagai sebuah kategori sosial melalui bekerjanya relasi-relasi tertentu pembagian, perbedaan dan ketimpangan antara kategori ini dan kategori-kategori lain.⁶

Tidak seperti gender, kelas dan etnisitas, bagaimanapun juga “generasi” per definisi adalah sasaran bergerak; kita masuk dan keluar berbagai generasi, dan ketika kita berbicara tentang perubahan generasi atau relasi generasional kita tidak sedang membicarakan perubahan yang terjadi pada kelompok orang tertentu, tetapi perubahan antara satu kelompok generasi dan kelompok yang menggantikannya. Tengok, misalnya, perubahan yang menarik dan cepat dalam pengalaman, gaya hidup dan identitas pemuda kampung yang diamati Patrick Guinness selama tiga dekade lebih di tepi Kali Code, Yogyakarta (Guinness 2009, Bab 5). Bukan orang mudanya yang berubah, tetapi kaum muda itu sendiri sebagai generasi sambung-menyambung memasuki, dan keluar dari, petak “pemuda”.

Makna ketiga “generasi”, dan yang sangat relevan dalam sejarah Indonesia, adalah sebuah generasi yang menjadi sebuah kategori sosial berarti (hanya) jika sejumlah signifikan pemuda mengembangkan dan mengungkapkan sebuah kesadaran diri sebagai “pemuda” dengan, pertama, menjalani peristiwa-peristiwa sosial dan historis yang sama dan mengalami itu sebagai hal signifikan bagi diri mereka dan, kedua, menindaklanjuti kesadaran tersebut, melintasi batas-batas pemisah seperti daerah, gender, kelas, etnis, pendidikan dan lain sebagainya (Mannheim 1928). Pengertian ini tercermin dalam istilah *angkatan* di Indonesia seperti yang diterapkan pada generasi muda yang aktif dalam pergolakan politik besar tertentu (revolusi nasional, kejatuhan rezim Sukarno maupun Suharto, juga pergolakan-pergolakan lebih kecil seperti Malari): Angkatan 45, Angkatan 65–66, Angkatan 98, dan seterusnya.

Pemuda (dan generasi dalam pengertian ketiga itu) merupakan tema lazim dalam penelitian tentang proses politik Indonesia, setidaknya setelah kajian klasik Anderson tentang peran pemuda pada awal revolusi Indonesia. Bagi Anderson “fakta paling mencolok periode itu” adalah “peran sentral Angkatan Muda” (1972, h. 1). Tergantung di sisi mana Anda berdiri, pemuda memunculkan “aura terorisme” atau “kesadaran meluap kemunculan tiba-tiba pemuda sebagai sebuah kekuatan revolusioner” (1972, h.1). Kaum muda Indonesia sering berada di garis depan tidak hanya dalam semua pergolakan politik nasional besar Indonesia, tetapi juga dalam kampanye pemilu rutin lokal dan nasional. Ini menyoroti paradoks utama keterlibatan generasi muda dalam proses politik. Loren Ryter mengemukakan bahwa “menurut representasi diri mereka, *pemuda* generasi 1945 [...] dan *pemuda* generasi 1966 sama-sama *pemuda* tepatnya karena mereka cukup berani mengungkap kehendak populer dengan menggugat kekuasaan” (2002, h. 73). Problematikanya, tentu saja, walaupun didefinisikan sebagai sebuah kelompok yang karena sifat mereka menggugat kekuasaan sebagai “pengawal perubahan”, begitu kekuasaan berhasil ditumbangkan dan rezim baru ditegakkan, otoritas baru memandang tantangan lebih jauh sebagai sesuatu yang berlebihan dan pemuda diharapkan mengubah diri menjadi wahana yang tidak lagi menggugat tetapi justru melegitimasi dan membela rezim baru, dan yang aktivisme kritisnya tidak diinginkan lagi (Ryter 1998, h. 58, Baulch 2007, h. 19).

Di satu pihak, peran pemuda memberi jalan ideal untuk melegitimasi rezim baru [...] Di lain pihak, terlalu banyak penekanan pada peran pemuda membuka kemungkinan bagi berulangnya performa yang tidak diinginkan [...] yang jadi soal adalah bagaimana membatasi akses pemuda. (Ryter 2002, h. 134)

Kebanyakan upaya untuk menyetir pemuda ke arah ini menghasilkan mode organisasi pemuda yang kurang indah, seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang dibentuk pada tahun 1973, atau Pemuda Pancasila yang pada tahun 1980-an menjadi entitas politik penting di seluruh Indonesia, dengan “kantore di semua tingkatan, mulai tingkat nasional dan provinsi hingga RT, yang masing-masing mengkoordinasi tingkatan di bawahnya” (Ryter 2002, h. 5).

Kedua dimensi pemuda Indonesia ini—sebagai garda depan perubahan sosial dan politik, dan pada saat yang sama merupakan ancaman berbahaya bagi stabilitas sosial dan politik—hidup berdampingan dengan canggung dalam pemahaman populer maupun akademik tentang pemuda. Orang-orang Indonesia sezaman dengan tulisan Anderson pada

awal 1970-an juga menyorot pentingnya generasi. Taufik Abdullah menyatakan betapa pengertian “pemuda” dan “generasi muda” sering dibebani nilai: “pemuda sebagai harapan bangsa”, “pemuda adalah milik masa depan”, atau “pemuda harus dibimbing” dan seterusnya, menunjukkan betapa saratnya nilai yang diimbangkan pada “pemuda”. Menyatakan dalam bahasa yang mengingatkan pada Mannheim bahwa ilmuwan sosial dan sejarawan jangan mendefinisikan pemuda berdasarkan usia tetapi berdasarkan “persepsi sosial dan pengalaman historis bersama”, dia mengatakan, “Perubahan sosial dicirikan oleh ketegangan dalam relasi antar-generasi, yang mengganggu komunikasi efektif di antara mereka” (Abdullah 1974, h. 1, 3).

Ketegangan antar-generasi sama sekali bukan barang baru—walaupun tiap generasi tua pendahulu menganggap itu baru—tetapi menjadi semakin mencolok di banyak daerah di Indonesia di mana bagi generasi-generasi belakangan (sejak periode akhir penjajahan) tiap laki-laki dan perempuan generasi muda baru memperoleh pendidikan lebih baik daripada orang tua dan pemuka masyarakat mereka (dalam hal pendidikan formal), tetapi sering tidak disertai dengan kecakapan mencari nafkah. Hampir empat dekade silam, Nurcholish Madjid menyatakan bahwa “kesenjangan generasi” (dalam hubungan keluarga dan di masyarakat lebih luas) “tidak harus didasarkan pada pemberontakan terbuka, tetapi dalam persepsi generasi muda bahwa generasi sebelumnya sudah kehilangan relevansi, sudah ketinggalan zaman dan ide-ide mereka kolot” (1973, h. 49).

Secara lebih umum, masa muda juga merupakan periode jalan hidup utama di mana *identitas* (termasuk identitas politik) dibentuk. Identitas diproduksi secara kolektif dan dalam proses ini kelas, etnisitas, agama dan seksualitas bersimpangan dalam beragam kombinasi, entah itu ketika kita membicarakan organisasi yang disusun menurut politik, pekerjaan dan agama (seperti Ansor, KNPI, HPMI, Pemuda Pancasila) atau organisasi-organisasi bawah tanah seperti geng jalanan perkotaan dan kelompok-kelompok agama radikal, atau berbagai organisasi yang termasuk dalam kategori di antara itu seperti Forum Betawi Rempug Jakarta (Leksana 2009, Kristiansen 2003) atau geng-geng sekolah yang dipaparkan oleh Kadir (2012).

Indonesia adalah negara mayoritas Muslim terbesar dan, walaupun Pemerintah Indonesia mengusung ideologi resmi negara berdasarkan pluralisme dan sekularisme, Islam publik menjadi semakin nampak. Kecenderungan ke arah meningkatnya relevansi Islam merupakan hasil dari perkembangan-perkembangan dalam gerakan Islam transnasional sejak

tahun 1970-an maupun perkembangan di dalam negeri selama periode Orde Baru (1966–1998). Perkembangan-perkembangan dalam negeri ini meliputi frustrasi makin besar dengan iklim korupsi dan represif rezim Suharto, hasrat bagi demokratisasi dan kecemasan tentang kemerosotan moral dan disintegrasi sosial yang dihubungkan dengan pesatnya modernisasi. Faktor-faktor ini memicu sebuah gerakan pembaruan Islam yang sebagian besar berbasis selama kelas menengah bawah dan kelas menengah perkotaan. Tidak seperti kebanyakan orang dari pedesaan dan kelas bawah perkotaan, kelas menengah kota punya waktu, uang dan sumber daya pendidikan untuk mengetahui Islam kontemporer melalui bacaan dan kelompok pengajian serta diskusi. Pemuda terdidik berada di garis depan gerakan ini, sebagaimana juga diperlihatkan oleh partisipasi mereka dalam kegiatan Islam di berbagai kampus (Brenner 1996, h. 677 – 678).

Menyusul upaya rezim Suharto untuk membatasi protes mahasiswa dan meminimalkan peran Islam politik, kebijakan tahun 1978 yang dikenal sebagai Normalisasi Kehidupan Kampus melarang kegiatan terbuka mahasiswa di kampus, membatasi kegiatan mahasiswa dan pemuda pada LSM dan organisasi akar rumput keagamaan. Walaupun mahasiswa hanya mempunyai “izin terbatas untuk melakukan protes yang tidak bisa menyebar ke kampus lain” suara-suara kritis mereka makin banyak disalurkan melalui forum-forum lain, tidak selalu bercorak politis, seperti kelompok-kelompok studi yang dibentuk di kota-kota universitas pada tahun 1980-an (Aspinall 2005, h. 119). Tidak ada katup politik lain yang bisa dipakai, sebuah kebangkitan aktivisme Islam di kampus-kampus, dikenal sebagai “Kampus Islam”, menarik mahasiswa untuk ambil bagian dalam organisasi mahasiswa Islam, seminar, kelompok studi dan aktivitas dakwah (Hasan 2010, h. 51–52). Di luar kampus, organisasi-organisasi akar rumput Islam seperti Remaja Masjid menyelenggarakan pelajaran baca tulis dan tafsir Alquran untuk remaja (Kiem 1993, h. 107–9). Gerakan pembaruan Islam berusaha menyingkirkan keyakinan dan praktik tradisional Islam yang dianggap tidak sesuai dengan bentuk-bentuk lebih ortodoks Islam.

Kepentingan keamanan nasional dan internasional tentang radikalisme dan terorisme Islam sering mengkarakterisasi pemuda Islam sebagai ancaman terhadap keamanan dan stabilitas dan berasumsi bahwa kombinasi melimpahnya pemuda (secara demografis), tingginya angka pengangguran dan marginalitas akan menyeret mereka ke Islam radikal (Herrera 2010, h. 129). Beberapa bulan setelah kejatuhan Suharto menyaksikan kemunculan kelompok-kelompok paramiliter radikal seperti Laskar Jihad (Hasan 2010) dan Front Pembela Islam (FPI) yang merekrut pemuda Islam untuk berperang dalam konflik komunal

kekerasan di Maluku antara tahun 1999 dan 2004. Tentu saja selama periode pasca-Suharto para pemuda Islam taat mendapat pengawasan lebih ketat setelah serangan teroris 9/11 pada tahun 2001, bom Bali 2002 dan 2005 serta “perang melawan teror” yang menyusul kemudian. Dugaan keterlibatan para santri dan ustadz mereka dalam kekerasan teroris memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana dukungan bagi Islam radikal di pesantren-pesantren.

Bagi kalangan pemuda lain, pesimisme dan kekecewaan politik diiringi konsumerisme baru mengusung identitas kultural non-politik baru, sebagaimana dikemukakan oleh Nilan:

Kami berpendapat bahwa sejak 1998 generasi muda Indonesia kehilangan jati diri sebuah generasi “untuk dirinya sendiri” (*pemuda*) dan lebih menjadi sebagai generasi “dalam dirinya sendiri” (*remaja, ABG*) yang lebih terkait dengan kemiripan sementara ketimbang dengan pengetahuan dan tujuan politik bersama (Nilan 2004a, h. 190).

Perkembangan-perkembangan ini, bersama persoalan-persoalan ekonomi dan terutama sekali ketidakmampuan strategi pertumbuhan yang ada untuk menciptakan lapangan kerja, mewarnai praktik tata pemerintahan atau pengelolaan pemuda oleh pemerintah. Logika neoliberal yang menjangkau pemuda memandangnya sebagai “modal manusia” (artinya, dilihat berpotensi menjadi sesuatu), diiringi oleh kesibukan dengan pencegahan terhadap apa yang dapat keliru, strategi-strategi pembatasan menghadapi “perilaku-perilaku berisiko”, kenakalan dan dampak budaya asing, yang bertujuan melindungi pemuda dari risiko terhadap mereka dan masyarakat dari risiko yang ditimbulkan oleh pemuda. Undang-undang baru tentang kepemudaan, dan upaya-upaya lain seperti pemberlakuan pelajaran “keterampilan hidup” dalam kurikulum sekolah nasional, merepresentasikan pengertian-pengertian yang hidup berdampingan tentang pemuda sebagai “harapan” dan sebagai “risiko” bagi bangsa dan masyarakat.⁷ Perpaduan strategi mengikutsertakan dan membatasi ini terangkum dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000–2004 yang menyertakan sebuah program untuk mendorong “partisipasi pemuda” dengan tujuan:

... memberi peluang lebih besar kepada pemuda guna memperkuat jati diri dan potensinya dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Program ini memiliki lima sasaran:

1. meningkatnya partisipasi pemuda dalam lembaga sosial kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan

2. terbentuknya peraturan perundang-undangan yang menjamin kebebasan pemuda untuk mengorganisasikan dirinya secara bertanggung jawab
3. meningkatnya jumlah wirausahawan muda
4. menurunnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba oleh pemuda
5. menurunnya angka kriminalitas yang dilakukan oleh pemuda⁸

Untuk memahami perhatian dan praktik pemerintah serta kemasyarakatan terkait pemuda ini, ada perlunya menerapkan pengertian “governmentalitas” pada tata kelola pemuda (Nadesan 2010), dan khususnya pada upaya untuk mengelola dan mendorong “transisi” yang sukses dan tak berisiko.

Kepemudaan sebagai Transisi

Kepemudaan Indonesia sebagai sebuah periode “transisi menuju masa dewasa” mengalami perpanjangan. Sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya, walaupun transisi (sebagai dimensi “menjadi” dari kepemudaan) mungkin menempati urutan teratas dalam pikiran dan praktik pemerintah serta orang dewasa terhadap pemuda, bagi pemuda laki-laki maupun perempuan sendiri dimensi “menjadi”—fokus pada menikmati masa muda itu sendiri, dan menjadi pemuda “sukses” di mata rekan-rekan sebaya—tak kalah pentingnya, meski mungkin itu merintangi transisi yang mulus dan sukses. Dengan kata lain, kaum muda laki-laki dan perempuan menganggap pendidikan dan pekerjaan sebagai bagian dari bagaimana mereka akan mewujudkan masa depan, tetapi juga berkepentingan dengan mengikuti gaya hidup dan hasrat kepemudaan pada saat ini.

Di Indonesia dan banyak negara selatan lainnya, selama setidaknya-tidaknya tiga generasi pola umumnya adalah setiap generasi muda baru biasanya berpendidikan lebih baik daripada orang tua mereka. Sayangnya perkembangan ini tidak diimbangi dengan perluasan jenis-jenis kesempatan kerja bagi kaum muda yang menempuh pendidikan untuk itu.

Sementara itu, seperti di banyak negara lain, pendidikan menengah dan tinggi terus melaju dari layanan publik yang merupakan “hak” dan diselenggarakan secara gratis (atau banyak disubsidi) menuju komoditas yang diperdagangkan secara bebas (lihat, misalnya, Tomasevski 2003, Bab 8), walaupun ada banyak kecaman terhadap kecenderungan ini (misalnya, Kartono 2009; Darmaningtyas & Panimbang 2009). Ada persoalan berkelanjutan buruknya kualitas pendidikan, dan pengangguran atau setengah pengangguran lulusan

pendidikan menengah dan tinggi. Dengan pesatnya penyebaran pendidikan tinggi—seratus perguruan tinggi baru membuka pendaftaran setiap tahunnya pada tahun 1990-an (Dhanani et al. 2009, h. 69)—pasokan alumni perguruan tinggi pada tahun 1980-an, 1990-an dan 2000-an bertambah lebih cepat daripada permintaan ekonomi terhadap mereka. Perekonomian, biarpun tumbuh, tidak mampu menciptakan lapangan kerja sektor modern baru sesuai kualifikasi yang dipenuhi para lulusan baru. Banyak, setelah bertahun-tahun sia-sia mencari kerja, berakhir dengan eksistensi ogah-ogahan dan frustrasi dalam sektor informal perkotaan. Mereka yang pertama kali mencari kerja memerlukan waktu rata-rata delapan bulan sebelum mendapat pekerjaan (Dhanani et al. 2009, h. 54) dan banyak yang harus melanjutkan pencarian lagi hingga bertahun-tahun. Ketimpangan antara persediaan dan permintaan bagi tenaga kerja terdidik menyebabkan para lulusan di setiap jenjang terpaksa menerima pekerjaan yang tadinya diisi oleh mereka yang berpendidikan lebih rendah (Keyfitz 1989, h. 35).

Sebagaimana sudah disebut di atas, ketika statistik tenaga kerja dan definisi pemuda konvensional (PBB) digunakan, hampir seperempat pemuda Indonesia berusia 15–24 yang tinggal di perkotaan, dan sepertiga dari mereka yang tinggal di pedesaan, menganggur secara terbuka. Perkiraan ini, meski memang mengejutkan, menutupi jumlah pemuda lainnya yang setengah menganggur dalam arti tidak cukup bekerja, menerima pekerjaan jauh di bawah kualifikasi mereka, dan/atau bekerja dengan jam kerja panjang dengan pendapatan jauh sekali di bawah upah minimum yang ditetapkan. Penelitian survei menunjukkan bahwa banyak pemuda meninggalkan sekolah dan mulai mencari kerja sebelum mereka berniat memasuki lapangan kerja, sementara yang lainnya meninggalkan pendidikan menengah dan tinggi sebelum waktunya karena mereka tidak suka, atau merasa bahwa melanjutkan pendidikan mereka tidak akan banyak gunanya dalam mencari kerja (Sziraczki & Reerink 2004, h. 51).

Dihadang persoalan masif pengangguran dan setengah pengangguran pemuda—yang dalam pengertian “tata kelola pemuda” dipandang sebagai ancaman bagi pembangunan ekonomi maupun stabilitas politik—wacana kebijakan makin cepat bergeser dari strategi Keynesian “menyediakan lapangan kerja” bagi pemuda menuju penekanan pada promosi keterampilan wirausaha kaum muda, sesuai dengan ide neoliberal bahwa mereka harus menciptakan pekerjaan sendiri. Untuk memahami relasi ini dan dinamikanya, kita dibantu oleh pengertian lebih luas tentang “reproduksi sosial” sebagai praktik material dan diskursif yang memungkinkan terjadinya reproduksi sebuah formasi sosial (termasuk hubungan-hubungan antara berbagai kelompok sosial dan anggota-anggotanya) (Wells 2009, h. 78).

Dunia kontemporer laki-laki dan perempuan muda Indonesia dapat dianggap mencerminkan sebuah “krisis reproduksi sosial”, ketika negara mengembalikan kerja reproduksi sosial kepada individu, keluarga dan kelompok-kelompok sosial, walaupun menyediakan sedikit sumber daya bagi kerja itu, melemahkan kapasitas komunitas atau seluruh masyarakat untuk memelihara fungsi relasi sosial dan menopang mereka yang belum mandiri (Wells 2009, h. 79). Dalam situasi demikian kaum muda mungkin boleh jadi dipaksa menyiasati strategi bertahan mereka, termasuk jalan-jalan tidak begitu legal “bekerja sendiri.”

Sehingga tidak mengherankan menyaksikan peningkatan penekanan pada promosi keterampilan “kewirausahaan” dalam kebijakan pemuda nasional, kebijakan pendidikan (“keterampilan hidup”), dan wacana kebijakan Bank Dunia serta ILO. Sebetulnya tak banyak bukti, kalau ada, bahwa kebijakan-kebijakan ini meningkatkan prospek pekerjaan atau penghasilan, dan beberapa ahli lantang mengkritik pendekatan ini:

Proyek-proyek peningkatan kesempatan kerja pemuda [...] harus diarahkan pada peningkatan keterampilan generik mereka, seperti presentasi tertulis, kefasihan bahasa Inggris dan penguasaan komputer, menjadikan mereka lebih menarik bagi pemberi kerja [...] Proyek pekerjaan pemuda jangan diarahkan pada kewirausahaan atau bekerja sendiri, sebab anak muda itu sendiri lebih tertarik menjadi pekerja gaji dalam sektor formal, tidak memiliki keahlian teknis memadai di bidang itu dan terlalu muda untuk mulai berbisnis (Dhanani et al. 2009, h. 80).

Penelitian survei di seluruh Indonesia (Dhanani et al. 2009, h. 64) dan penelitian lain di Jakarta, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur (Sziraczki & Reerink 2004, h. 25 – 28) menunjukkan bahwa metode mencari kerja terbesar yang dipakai para pencari kerja muda bertumpu pada “jaringan informal” bukannya pendaftaran dan prosedur seleksi formal. Hal ini diteguhkan oleh pengalaman dan persepsi orang-orang muda dalam penelitian di Cilegon, Pontianak, Ternate dan Indramayu yang dilakukan Naafs, Minza, Amin dan Sano (dalam jurnal ini) bahwa kualifikasi formal itu perlu, tetapi tidak cukup, untuk bisa lolos seleksi, dan pada akhirnya memperoleh pekerjaan nampaknya lebih membutuhkan koneksi personal dan tumpuan pada privilese kelas atau identitas etnis dalam menegosiasikan akses pekerjaan.

Salah satu strategi penting pemuda dalam menegosiasikan transisi adalah mobilitas. Mobilitas pemuda bukan barang baru. “Perantauan” pemuda lelaki mencari ilmu dan/atau mata pencaharian sudah menjadi bagian mapan dari budaya Jawa dan Minangkabau, misalnya, sementara mobilitas perempuan muda sangat terbatas. Tetapi mobilitas ini sekarang

menjangkau semua kelas sosial dan kedua gender. Laki-laki maupun perempuan muda di pedesaan sering didorong (kadang-kadang malah dipaksa) oleh orang tua mereka untuk pergi dari desa, entah itu untuk melanjutkan pendidikan (lihat penelitian Wenty Minza di Pontianak dalam jurnal ini) atau mencari pekerjaan di pabrik-pabrik kota maupun pinggiran kota (semua gender) dan mal (lebih banyak perempuan), dan bermacam-macam pekerjaan lainnya, termasuk pembantu rumah tangga (terutama perempuan) dan sektor hiburan serta seks komersial (lihat Atsushi Sano dalam jurnal ini).

Migrasi-migrasi ini sekarang tidak selalu permanen; kita perlu mengeksplorasi lebih jauh fenomena migrasi sirkuler dan sebagian umur hidup ini. Bagi pemuda, “desa” (dan juga “pertanian”) bisa menjadi tempat di mana Anda tumbuh, yang akan Anda tinggalkan untuk mencari kerja di kota, tetapi mungkin nantinya Anda menitipkan anak-anak untuk diasuh kakek nenek mereka, dan mungkin kelak tempat Anda pulang untuk menjadi petani, ketika tanah garapan sudah dipunyai dan kerja di kota memberikan modal untuk berbagai perbaikan.⁹

Generasi muda di pedesaan Indonesia nampaknya tidak berminat pada masa depan pertanian dan berniat bergabung dalam pergerakan menuju perkotaan (Koning 1997, 2004, White & Margiyatin 2009), seperti yang umum terjadi di Asia Tenggara (Hall et al. 2011, h. 118). Meski begitu pada saat yang sama organisasi dan gerakan petani kecil di berbagai tempat di Indonesia berkampanye dan melakukan lobi untuk mempertahankan akses pada sumber daya bagi pertanian skala kecil dalam menghadapi berbagai tekanan eksternal dan internal terhadap petani kecil. Klaim-klaim tentang alternatif skala kecil bagi pertanian ini mengasumsikan (walaupun persoalan ini jarang diangkat) bahwa ada generasi muda pedesaan yang ingin menjadi petani kecil di masa depan. Jika tidak, tentunya para pendukung petani kecil tidak punya argumen melawan pertanian masa depan berbasis budi daya industri korporat skala besar. Oleh sebab itu menjadi sangat penting menanyakan ada apa di balik penolakan nyata pemuda pedesaan terhadap masa depan pertanian.

Kajian-kajian dalam kumpulan artikel ini memberi sumbangan penting bagi pemahaman tentang strategi laki-laki dan perempuan muda dalam mengupayakan jenis-jenis pekerjaan urban yang diinginkan (Naafs dan Minza, masing-masing di Cilegon dan Pontianak), menemukan ceruk dalam pekerjaan lain yang kurang diminati ketika tidak ada kesempatan (Basri Amin tentang pengojek di Ternate), dan dalam melawan atau menyerah

pada tekanan untuk memasuki dunia berbahaya lagi tidak mengenakan seperti perdagangan seks komersial (Atsushi Sano di pedesaan Indramayu).

Pemuda sebagai Pencipta dan Konsumen Budaya

Salah satu tradisi panjang dalam kajian pemuda adalah fokus pada pemuda sebagai pencipta dan konsumen budaya. Meski literatur berpengaruh tentang subkultur pemuda yang muncul di Inggris terutama bergelut dengan pemuda kelas pekerja,¹⁰ penelitian tentang bagaimana pemuda di Indonesia bergumul dengan bentuk-bentuk budaya populer arus utama maupun bawah tanah cenderung terfokus pada pemuda urban relatif kaya yang tinggal di kawasan metropolitan dan ibu kota provinsi.

Dengan berkelanjutannya globalisasi ekonomi dan budaya serta kecenderungan pada perpanjangan masa muda, makin banyak pemuda di Indonesia yang tumbuh dalam sebuah sistem referensi global budaya dan gaya hidup pemuda berbasis konsumen. Ironisnya, globalisasi memasukkan mereka ke dalam budaya dan konsumerisme kaum muda, tetapi pada saat yang sama mengesampingkan mereka dari situ karena posisi ekonomi marginal mereka (Comaroff & Comaroff 2005). Terdapat perbedaan spektakuler dalam hal kemakmuran antara yang kaya dan yang miskin dan sekalipun ada kelas menengah kecil yang sedang tumbuh, kelas ini hanya meliputi bagian sangat kecil dari keseluruhan penduduk (Barendregt 2008, h. 161). Jutaan pemuda Indonesia tidak punya uang untuk menikmati tren terbaru dalam *fashion*, musik dan ITC (teknologi informasi dan komunikasi), atau berada di sisi yang salah “jurang digital” karena mereka tinggal di salah satu dari banyak daerah yang miskin akses internet. Tetapi, seperti dikemukakan Bayat dan Herrera (2010, h. 17), “mereka mendapatkan cara mengungkapkan selera muda dengan mengandalkan ... ‘globalisasi murah’, misalnya tampil dengan merek khas global tapi palsu seperti topi *baseball* Nike atau mendengarkan CD internasional bajakan.”

Dua tema penting yang mewarnai kajian produksi kultural di Indonesia adalah kemunculan pola konsumsi baru dan peran gerakan Islam dalam kaitannya dengan identitas dan praktik kaum muda. Kedua fenomena ini tumbuh sejak tahun 1970-an dan 1980-an, ketika rezim otoriter Orde Baru Suharto (1966-1998) berusaha menciptakan sebuah budaya nasional berdasarkan sekularisme dan pluralisme dan berusaha membatasi peran generasi

muda dengan mengarahkan orientasi mereka lebih pada konsumsi ketimbang kegiatan politik di kampus (Guinness 2009, h. 128), sebagaimana sudah disebut dalam bagian terdahulu.

Sejak tahun 1970-an pemuda menjadi sasaran empuk di media massa sebagai konsumen potensial. Sebagai bagian dari agenda pemerintah untuk mendepolitisasi pemuda, ide-ide dan kategori baru pemuda diperkenalkan, seperti pengertian “remaja”. Berbeda dengan pengertian *pemuda* yang problematis, remaja mempunyai konotasi “selera”, “mode”, “musik” dan “bahasa anak muda” tersendiri (Siegel 1986, h. 230–1). Kaum remaja kelas menengah (atas) Indonesia di kota-kota metropolitan berbangga karena tampil trendi, sangat bergairah terhubung dengan tren dan gaya hidup global, mengembangkan mode-mode tersendiri “budaya mal perbelanjaan” (Setiawan 2006) dan menggunakan bahasa mereka sendiri, *bahasa gaul* (Sastramidjaja 2000, h. 64, Smith-Hefner 2007, h. 184).

Pada saat yang sama, gaya hidup dan pola konsumsi baru semacam itu sering kali mengundang kepanikan moral dan pengawasan orang dewasa ketika gaya hidup demikian dikritik karena mendatangkan terlalu banyak materialisme, individualisme dan hilangnya nilai-nilai penting budaya serta agama. Musik *underground* memberi peluang bagi protes sosial terhadap realitas sosial politik menindas rezim Suharto dan menyalurkan frustrasi, emosi serta aspirasi anak-anak muda yang tidak menganut gaya hidup kaya berorientasi konsumen *anak gaul* ciptaan Pemerintah Orde Baru (Sastramidjaja 2000, Wallach 2002, Bodden 2005). Sama halnya dengan Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies, terdapat bias terhadap subkultur sangat kentara maskulin dalam kajian-kajian musik *underground* itu. Karya terbaru Sean Martin-Iverson memberikan perspektif menarik tentang identitas dan praktik lingkungan musik *underground* Indonesia sebagai reaksi terhadap maupun refleksi pengalaman “*precarity*”^{*} di kalangan generasi muda; walaupun menggunakan identitas bawah tanah dan jaringan komunitas otonom mereka untuk menunjukkan independensi mereka dari tuntutan modal, pada saat yang sama “mereka juga memobilisasi independensi ini sebagai basis aktivitas kewirausahaan mereka sendiri, menghasilkan sebuah kecenderungan yang baru muncul pada akumulasi modal dan polarisasi kelas lingkungan itu sendiri” (Martin-Iverson 2012). Paradoks ini mungkin berlaku bagi bentuk-bentuk dan varietas lain ekspresi kultural kaum muda.

* Precarity: Kondisi eksistensi tanpa prediktabilitas atau jaminan, berpengaruh pada kesejahteraan material dan psikologis.

Ada sejumlah studi yang mengkaji rentang pilihan gaya hidup bagi remaja perempuan yang secara berkala digambarkan di media, misalnya, di makalah, novel romantis dan seri TV *soap opera* (Brenner 1999, Nilan 2004b). Studi tersebut menyorot perubahan dan sering kali kontradiksi pesan-pesan tentang perilaku feminin dan pilihan gaya hidup yang sesuai. Kesetaraan gender dan otonomi bagi perempuan muda masih diperdebatkan, tetapi setidaknya hal tersebut mengisyaratkan pergeseran ke arah varietas lebih besar identitas religius dan gender bagi perempuan muda, di rumah maupun di tempat umum.

Walaupun ada banyak perhatian di media pada citra femininitas (baik yang bersifat kebaratan maupun yang bercorak keislaman), baru belakangan saja berbagai kajian mulai menelaah persoalan tentang budaya maskulinitas di Indonesia (Nilan 2009). Kajian mutakhir Suzie Handajani tentang representasi remaja pria dalam majalah “Hai” di Indonesia pasca-Suharto menunjukkan peran representasi itu dalam menyediakan forum bagi identifikasi dan diskusi persoalan-persoalan yang sebelumnya dipendam, seperti sekolah dan cara pelajaran-pelajaran tertentu disampaikan, kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan, pendidikan seks dan masalah-masalah “sulit” spesifik seperti masturbasi (Handajani, segera terbit). Kadir (2012) mengeksplorasi budaya maskulinitas (kejantanan, ketangguhan, bersenang-senang, dan persahabatan serta solidaritas laki-laki) dalam tawuran musiman antara geng-geng sekolah di Yogyakarta.

Sebagai aktor sosial, di satu pihak pemuda diromantisasi oleh dunia orang dewasa (masa depan kita di tangan mereka, dan sebagainya), tetapi pada saat yang sama dianggap penyakit dan dikhawatirkan ketika mereka berperilaku dalam cara-cara yang tidak disepakati orang dewasa. Masa muda dianggap sebagai “usia rawan” (Mayer & Mayer 1990) dan usia problem (ketika pemuda bereksperimen dengan narkoba, seks, pakaian, dan jenis-jenis rekreasi yang tidak disepakati orang dewasa). Itulah wacana di kalangan pembuat kebijakan tentang “rehabilitasi” dan “reintegrasi” pemuda yang bermasalah, anak jalanan, pengguna narkoba, dan lain sebagainya, istilah-istilah yang sebenarnya merujuk pada penjahat dan orang sakit (Ali et al. 2007, Gordon & Gordon 2003).

Masa muda juga merupakan periode perkembangan aktif seksualitas (dan maskulinitas/femininitas); seperti dalam berbagai masyarakat Asia Tenggara lainnya, dalam beberapa kelas sosial dan dalam beberapa lingkaran kebijakan masalah ini membikin orang merasa tidak nyaman, sebuah dimensi tak mengenakan hubungan pemuda-orang dewasa (Manderson & Liamputtong 2002). Di pedesaan Yogyakarta, gadis-gadis remaja

menyebutkan pembatasan lebih ketat pada mobilitas mereka, dan pengawasan lebih ketat terhadap perilaku mereka, sebagai alasan di balik keinginan perempuan-perempuan muda untuk bermigrasi (White & Margiyatin 2009). Penelitian Sano dan Platt (masing-masing di pedesaan Indramayu dan Lombok, dalam jurnal ini) memaparkan relasi antar-generasi dan dinamika kekuasaan antara orang tua dan anak perempuan, khususnya cara-cara di mana nilai normatif kewajiban anak gadis remaja terhadap orang tua mereka dipergunakan untuk membatasi kemampuan gadis remaja merundingkan keputusan untuk memasuki kerja seks (Sano) atau perkawinan dini (Platt).

Pergeseran generasional penting bisa dilihat dalam pola pacaran dan perkawinan (Smith-Hefner 2005) dan seksualitas pemuda di dalam dan di luar perkawinan (Sastramidjaja 2000, Smith-Hefner 2006, Utomo & McDonald 1997). Maria Platt (dalam jurnal ini) mengeksplorasi *agency* ambivalen perempuan muda dalam pilihan perkawinan dalam praktik kawin lari di Lombok. Pemberitaan dan rumor tentang hubungan seks pranikah adalah masalah yang semakin meningkatkan keprihatinan dan kepanikan moral (Djaelani 2006, Sujarwo 2008), nampak jelas dalam pemberlakuan Undang-Undang Anti-Pornografi pada tahun 2008 dan wacana dominan umum tentang pergaulan bebas sebagaimana dieksplorasi oleh Tracy Wright-Webster (segera terbit).

Kajian-kajian tahun 1990-an kadang-kadang menempatkan Islam sebagai antitesis westernisasi, tetapi kajian-kajian belakangan menunjukkan bahwa “Islam Indonesia kontemporer bersintesis dengan karakteristik gaya hidup modernitas akhir” dalam budaya hibrida Muslim muda (Nilan 2006, h. 92). Bukan hal aneh mendapati pertentangan antara orang tua dan anak mengenai pemahaman Islam yang “benar”, dan aksentuasi kesenjangan generasi ketika anak mulai menentang orang tua mereka:

Perasaan didukung oleh otoritas moral lebih tinggi memungkinkan anak menentang orang tua yang melarang mereka berkerudung atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan Islam. Perasaan itu juga mengizinkan mereka mengeluhkan ketidaktahuan atau ketidakpedulian orang tua terhadap kewajiban agama, bahkan mendesak orang tua mereka untuk lebih taat, tanpa merasa malu melanggar ketentuan budaya ... Ini membedakan generasi muda Muslim taat dari kebanyakan orang tua mereka yang kurang religius atau lebih tradisional, menciptakan kesenjangan tajam generasi antara mereka (Brenner 1996, h. 683).

Di kalangan perempuan muda mengenakan jilbab menjadi manifestasi makin lazim apa artinya menjadi Muslimah muda dan modern di sebuah negeri yang secara tradisional jarang

perempuan berjilbab. Walaupun berjilbab ditafsirkan sebagai penanda identitas bagi Muslimah muda taat, jilbab juga ditempatkan dalam konteks perdebatan sengit tentang moralitas dan seksualitas bagi perempuan muda sebagaimana diperlihatkan oleh pengesahan undang-undang anti pornografi, atau prakarsa untuk mewajibkan jilbab menyusul otonomi daerah (Parker 2009). Penelitian Eva Nisa tentang pemakaian cadar di kalangan mahasiswa terkait gerakan revivalis Salafi memberikan uraian sensitif bernuansa tentang berbagai daya tarik yang membuat sebagian perempuan muda “jatuh cinta” dengan Islam Salafi sebagai (menurut mereka) “versi Islam paling orisinal dan murni dibandingkan, umumnya, dengan Islam yang diamalkan orang tua mereka” (Nisa, segera terbit).

Penguasa di Indonesia sering memandang curiga keterlibatan anak muda dengan media sebagaimana tercermin dalam sejarah panjang upaya pemerintah menyensor dan mengatur serta menetapkan filosofi bahwa media harus menjadi alat dalam upaya perwujudan kesatuan nasional dan pembangunan bangsa. Misalnya, Presiden Sukarno menyebut penyanyi populer seperti Elvis Presley dan The Beatles sebagai contoh khas “imperialisme budaya Barat” yang tidak cocok bagi pemuda Indonesia, menyebabkan pelarangan terhadap rekaman para penyanyi itu (Sen & Hill 2000, h. 165 – 6). Selama dan sesudah periode Suharto, wacana normatif tentang pemuda dan media mengasumsikan adanya pengaruh negatif media massa pada generasi muda, tercermin dalam sebuah “budaya menyalahkan” bahwa media telah

... membaratkan kaum muda, mengubah mereka menjadi konsumen dungu mode dan tren; mempengaruhi kaum muda untuk meninggalkan tradisi dan agama; mendorong kaum muda bersikap seenaknya sendiri, minum alkohol dan menggunakan narkoba; menumbuhkan selera pada pornografi dan kecabulan; merangsang kenakalan dan kriminalitas” (Nilan 2004b, h. 169).

Pernyataan-pernyataan familier ini tidak hanya muncul dalam pemberitaan media populer melainkan juga bisa dijumpai dalam beberapa karya peneliti Indonesia tentang pemuda dan kriminalitas serta pemuda dan seksualitas.

Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara dengan penetrasi internet relatif rendah,¹¹ tetapi pada saat yang sama menjanjikan sebagai salah satu pasar regional yang paling pesat berkembang bagi media baru (Barendregt 2006, h. 160). Walaupun infrastruktur internetnya relatif buruk, belum lama ini Indonesia menyaksikan pertumbuhan fenomenal dalam penggunaan Facebook, dan kini [2011, redaksi] menempati peringkat kedua pengguna Facebook di dunia dengan sekitar 40,8 juta pengguna.¹² Hal ini menimbulkan kepanikan

mutakhir tentang bagaimana situs jejaring sosial seperti Facebook akan menyuburkan pergaulan bebas, dan berbagai organisasi (misalnya Nahdlatul Ulama) berusaha membuat aturan. Pesatnya perkembangan Facebook di Indonesia nampaknya disebabkan oleh mudahnya kaum muda mengakses situs jejaring sosial itu melalui aplikasi internet di telepon genggam mereka, tanpa harus repot-repot pergi ke warnet. Walaupun sebagian orang menyalahkan media karena pengaruhnya yang diduga negatif terhadap kaum muda, sebagian yang lain mengunggulkan teknologi informasi itu sebagai sumber pengetahuan dan *agency* bagi generasi muda. Pemuda yang punya akses ke telepon genggam dan internet bisa menghubungkan diri dengan dunia luas yang sering tidak dipahami orang tua mereka, memungkinkan mereka menentang atau menerobos kontrol orang tua.

Seperti di negara-negara lain, budaya pemuda Indonesia cenderung “terbuka secara spasial” (Ansell 2005, h. 83) karena kaum muda laki-laki dan perempuan dengan kreatif mengadopsi, meramu, menafsirkan dan menolak budaya populer Barat dan Islam untuk menciptakan budaya muda hibrida sendiri (Nilan 2006). Mereka tidak hanya berusaha menghubungkan diri dengan berbagai tren dalam budaya populer global, tetapi juga mengambil inspirasi dari perkembangan terbaru dalam bahasa, mode, musik dan gaya hidup yang berasal dari pusat-pusat urban di Jawa, seperti Jakarta, Bandung dan Yogyakarta. Meski begitu, sejauh mana pemuda bebas menciptakan identitas dan gaya hidup baru harus dipahami dalam konteks hubungan mereka dengan kelompok-kelompok lain perkembangan-perkembangan sosial, ekonomi, politik lebih luas dalam masyarakat Indonesia.

Catatan

- [1] Tulisan ini lahir dari upaya penulis selama dua tahun terakhir untuk menghimpun sebuah bibliografi terpilih kajian-kajian tentang pemuda Indonesia. Tulisan ini belum mencakupi sebagian besar literatur yang kami identifikasi, hanya satu bagian di antaranya yang dibicarakan di sini.
- [2] Dalam pengertian ini persepsi umum “petani meninggalkan pertanian dan pindah ke kota” sangat tidak akurat: sebetulnya bukan petani tetapi anak-anak petani yang memutuskan untuk tidak mengikuti pekerjaan orang tua mereka dan pindah ke kota mencari pekerjaan non-pertanian.

- [3] Rancangan Undang-Undang tentang Kepemudaan dan “Naskah Akademik” yang menyertainya pada mulanya menetapkan rentang usia 18–35. Batas awal yaitu 18 tahun beralsan masuk akal agar tidak bertumpang tindih dengan definisi “anak” (0-17 tahun) yang diatur oleh peraturan perundang-undangan baru lainnya (tentang Perlindungan Anak), tetapi batas akhir 35 tahun itu diusulkan tanpa argumentasi (Menpora, tanpa tahun, h. 30, 36).
- [4] Di antara negara-negara Asia lainnya, Thailand menetapkan masa muda hingga usia 25 tahun, Filipina hingga 30 tahun, Vietnam dan Papua Nugini hingga 30 tahun dan Malaysia hingga 40 tahun.
- [5] Generalisasi tentatif ini berasal dari penelitian berkelanjutan Sano, White dan Margiyatun, dan Naafs (semua dari Jawa).
- [6] Mengungkapkan pendapat Alanen (2001, h. 13) tentang masa kanak-kanan sebagai relasi generasional.
- [7] Lihat karya penelitian MA oleh Diatyka Widya Permata Yasih (2010) dan Mike Ingriani (2010) masing-masing tentang dekonstruksi Undang-Undang Kepemudaan dan Pendidikan Keterampilan Hidup.
- [8] Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000–2004, Subbagian 4.2.
- [9] Pemahaman baru tentang kehidupan desa dan pedesaan ini dipaparkan cermat dalam *Generations of Change* karya Juliet Koning (2004).
- [10] Selama tahun 1970-an dan 1980-an CCCS di Universitas Birmingham menghasilkan sejumlah kajian berpengaruh tentang subkultur pemuda kelas pekerja Inggris. Gaya dan aktivitas subkultur maskulin ini ditafsirkan sebagai perlawanan simbolis terhadap kekuasaan kekuatan dominan dalam masyarakat mereka, misalnya, dalam kajian klasik Paul Willis tentang subkultur anti-sekolah anak-anak laki-laki kelas pekerja (1997).
- [11] Penetrasi internet Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 16,1 persen, jauh lebih rendah dari Malaysia (58,8 persen), Vietnam (32,3 persen), Filipina (29,2 persen) atau Thailand (27,4 persen), tetapi lebih tinggi dari Laos (8,1 persen) atau Myanmar (0,2 persen). Statistik untuk Maret 2011 dari <http://www.internetworldstatistics.com/stats3.htm>, diakses pada 20 Oktober 2011.

[12] Statistik untuk Oktober 2011 dari <http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/indonesia>, diakses pada 20 Oktober 2011.

Referensi

- Abdullah, T. & Yasin, M. (eds) (1974) *Pemuda dan Perubahan Sosial*, LP3ES, Jakarta.
- Alanen, L. (2001) 'Explorations in generational analysis', dalam *Conceptualizing Child-Adult Relations*, eds L. Alanen & B. Mayall, Routledge, London, h. 11–22.
- Ali, M., Amir, P. & Duse, I. (penyunting) (2007) *Narkoba: Ancaman Generasi Muda*, DPD KNPI Kalimantan Timur, Yogyakarta, Pustaka Timur, Samarinda.
- Anderson, B. (1972) *Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946*, Cornell University Press, Ithaca.
- Aspinall, E. (1995) 'Students and the military: Regime friction and civilian dissent in the Late Suharto Period', *Indonesia*, vol. 59, pp. 21–44.
- Ansell, N. (2005) *Children, Youth and Development*, Routledge, London and New York.
- Barendregt, B. (2006) 'Cyber-Nasyid: Transnational soundscapes in Muslim Southeast Asia', dalam *Medi@asia: Communication, Culture, Context*, ed. T. Holden & T. Scrase, Routledge, London, h. 171–87.
- Barendregt, B. (2008) 'Sex, cannibals and the language of cool: Indonesian tales of the phone and modernity', *The Information Society*, vol. 24, no. 3, h. 160–70.
- Baulch, E. (2007) *Making Scenes: Reggae, Punk, and Death Metal in 1990s Bali*, Duke University Press, Durham.
- Bayat, A. & Herrera, L. (2010) 'Introduction: Being young and Muslim in neoliberal times', dalam *Being Young and Muslim. New Cultural Politics in the Global South and North*, ed. L. Herrera & A. Bayat, University Press, New York, Oxford, h. 3–25.
- Bodden, M. (2005) 'Rap in Indonesian youth music of the 1990s: "Globalization", "outlaw genres", and social protest', *Asian Music*, vol. 36, no. 2, h. 1–26 .
- Bodden, M. (2005) 'Rap in Indonesian youth music of the 1990s: "Globalization", "outlaw genres", and social protest', *Asian Music*, vol. 36, no. 2, h. 1–26.
- Brenner, S. (1996) 'Reconstructing self and society: Javanese Muslim women and "the Veil"', *American Ethnologist*, vol. 23, no. 4, h. 673–97.
- Brenner, S. (1999) 'On the public intimacy of the New Order: Images of women in the popular Indonesian print media', *Indonesia*, vol. 67, April, h. 13–37.

- Comaroff, J. & Comaroff, J. (2005) 'Reflections on youth from the past to the postcolony', dalam *Makers and Breakers: Children and Youth in Postcolonial Africa*, ed. A. Honwana & F. De Boeck, James Currey, Oxford, pp. 19–30.
- Corsten, M. (1999) 'The time of generations', *Time & Society*, vol. 8, no. 2/3, h. 249–72.
- Darmaningtyas, E. S. & Panimbang, I. F. (2009) *Tirani Kapital dalam Pendidikan*, Damar Press/Pustaka Yashiba, Yogyakarta.
- Dhanani, S., Islam, I. & Anis Chowdhury, A. (2009) *The Indonesian Labour Market: Changes and Challenges*, Routledge, London.
- Diatyka Widya Permata Yasih (2010) 'Problem or potential? Indonesia's new law on youth', MA Research Paper, International Institute of Social Studies, The Hague.
- Djaelani, A. Q. (2006) *Pornografi, Pornoaksi dan Prostitusi: Strategi Barat untuk Menghancurkan Generasi Muda Islam: Analisis, Fakta, dan Filosofis*, Rabitha Press, Bekasi.
- Gordon, J. D. & Gordon, D. D. (2003) 'Drug abuse in Indonesia: An increasing problem during the economic crisis', dalam *The Indonesian Crisis: A Human Development Perspective*, ed. A. Ananta, ISEAS Press, Singapore, h. 362 – 81.
- Guinness, P. (2009) *Kampung, Islam and State in Urban Java*, KITLV Press, Leiden.
- Hall, D., Hirsch, P. & Li, T. (2011) *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*, NUS Press, Singapore.
- Handajani, S. (akan terbit) 'Young and restless: Representing male adolescents with the spirit of reform in *Hai* magazine', *Asia-Pacific Journal of Anthropology*.
- Hasan, N. (2010) 'The drama of Jihad: The emergence of Salafi Youth in Indonesia', dalam *Being Young and Muslim. New Cultural Politics in the Global South and North*, ed. L. Herrera & A. Bayat, Oxford University Press, New York, h. 49–62.
- Herrera, L. (2010) 'Young Egyptians' quest for jobs and justice', dalam *Being Young and Muslim: New Cultural Politics in the Global South and North*, ed. L. Herrera & A. Bayat, Oxford University Press, New York, h. 127–44.
- Indonesia Youth Employment Network (2004) *Unlocking the Potential of Youth: Indonesia Youth Employment Action Plan 2004-2007*. Tersedia di: http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_124971/lang--en/index.htm. Diakses 8 November 2010.
- Ingriani, M. (2010) 'Life skills education and state-youth relations in Indonesia', MA Research Paper, International Institute of Social Studies, The Hague.
- Jones, G. (2009) *Youth*, Polity Press, Cambridge.

- Kadir, H. (2012) 'School gangs in Yogyakarta: mass fighting strategies and masculine charisma in the city of students', *Asia-Pacific Journal of Anthropology* vol. 13 no. 4, h. 352-365.
- Kartono, St. (2009) *Sekolah Bukan Pasar: Catatan Otokritik Seorang Guru*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Keyfitz, N. (1989) 'Putting trained labour power to work: The dilemma of education and employment', *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, vol. 25, no. 3, h. 35–55.
- Kiem, C. (1993) 'Re-Islamization among Muslim youth in Ternate town, Eastern Indonesia', *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, vol. 8, no. 1, h. 92–127.
- Koning, J. (1997) *Generations of Change: A Javanese Village in the 1990s*, PhD Thesis, University of Amsterdam.
- Koning, J. (2004) *Generations of Change: Migration, Family Life and Identity Formation in a Javanese Village During the New Order*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kristiansen, S. (2003) 'Violent youth groups in Indonesia: The cases of Yogyakarta and Nusa Tenggara Barat', *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, vol. 18, no. 1, h. 110–38.
- Leksana, G. (2009) 'Struggling to be young: Brotherhood among the urban poor of Jakarta', *Inside Indonesia*, vol. 95, January – March. Diakses online 15 Januari 2012.
- Lloyd, C. (ed.) (2005) *Growing up Global: The Changing Transitions to Adulthood in Developing Countries*, The National Academies Press, Washington, DC.
- Madjid, Nurcholish (1973) 'Remaja, Keluarga, & Masyarakat di Kota Besar. Suatu Usaha Pendahuluan untuk Memahami Persoalan Sekitar "Generation Gap"', *Prisma*, vol. 2, no. 5, h. 45–51.
- Manderson, L. & Liamputtong, P. (2002) *Coming of Age in South & Southeast Asia: Youth, Courtship & Sexuality*, NIAS/Curzon, Richmond.
- Mannheim, K. (1952) 'The problem of generations', dalam *Karl Mannheim: Essays on the Sociology of Knowledge*, ed. P. Kecskemeti, Routledge, London, pp. 276 – 320 (versi asli 1928).
- Martin-Iverson, S. (2012) 'Autonomous youth? Independence and precariousness in the Indonesian underground music scene', *Asia-Pacific Journal of Anthropology* vol. 13 no. 4, h. 382-397.
- Mayall, B. (2002) *Towards a Sociology for Childhood: Thinking from Children's Lives*, Open University Press, Buckingham.
- Mayer, P. & Mayer, I. (1990) 'A dangerous age: From boy to young man in Red Xhosa youth

- organisations’, dalam *The Riddle of the Sphinx: Paradoxes of Change in the Life Course*, ed. Paul Spencer, ASA Monographs 28, Routledge, London, pp. 36–44.
- Menpora (2008) *Penyajian Data Informasi Kementerian Pemuda dan Olah Raga Tahun 2008*, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Jakarta.
- Menpora (tanpa tahun [sekitar 2008]) *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kepemudaan*, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Jakarta.
- Nadesan, M. H. (2010) *Governing Childhood into the 21st Century: Biopolitical Technologies of Childhood Management and Education*, PalgraveMacmillan, Basingstoke.
- Nilan, P. (2004a) ‘The Risky Future of Youth Politics in Indonesia’, *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, vol. 38, no. 1, pp. 173–94.
- Nilan, P. (2004b) ‘The social meanings of media for Indonesian youth’, dalam *Globalization, Culture and Inequality in Asia*, ed. T. Scrase, T. Holden, & M. Baum, Trans Pacific Press, Melbourne, h. 168–90.
- Nilan, P. (2006) ‘The reflexive youth culture of devout Muslim youth in Indonesia’, dalam *Global Youth? Hybrid Identities, Plural Worlds*, ed. P. Nilan & C. Feixa, Routledge, London and New York, h. 91–110.
- Nilan, P. (2009) ‘Contemporary Masculinities and Young Men in Indonesia’, *Indonesia and the Malay World*, vol. 37, no. 109, h. 327–44.
- Nisa, E. (akan terbit) ‘Finding a niche: Face-veiled university students in Indonesia’, *Asia-Pacific Journal of Anthropology*.
- Parker, L. (2009) ‘Religion, class and schooled sexuality among Minangkabau teenage girls’, *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde*, vol. 165, no. 1, h. 62–94.
- Roberts, K. (2009) *Youth in Transition: Eastern Europe and the West*, PalgraveMacmillan, Basingstoke.
- Ryter, L. (2002) *Youth, Gangs and the State in Indonesia*, PhD Dissertation, University of Washington.
- Ryter, L. (1998) ‘Pemuda Pancasila: The last loyalist free men of Suharto’s order?’, *Indonesia*, vol. 66, pp. 44–73.
- Sziraczki, G. & Reerink, A. (2004) *Report of Survey on the School-to-Work Transition in Indonesia*, ILO Gender Promotion Programme Working Paper no. 14, Geneva.
- Sastramidjaja, Y. (2000) *Dromenjagers in Bandung: Twintigers in het moderne Indonesië*, Uitgeverij Het Spinhuis, Amsterdam.

- Sen, K. & Hill, D. (2000) *Media, Culture and Politics in Indonesia*, Oxford University Press, Melbourne.
- Setiawan, A. B. S. (2006) *Pengaruh Keberadaan Mall Terhadap Subkultur Anak Muda di Solo: Laporan Penelitian*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Siegel, J. (1986) *Solo in the New Order: Language and Hierarchy in an Indonesian City*, Princeton University Press, Princeton, NJ.
- Smith-Hefner, N. (2006) 'Reproducing respectability: Sex and sexuality among Muslim Javanese Youth', *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, vol. 40, no. 1, h. 143–72.
- Smith-Hefner, N. (2005) 'The new Muslim romance: Changing patterns of courtship and marriage among educated Javanese youth', *Journal of Southeast Asian Studies*, vol. 36, no. 3, h. 441–59.
- Smith-Hefner, N. (2008) 'Youth language, Gaul sociability, and the New Indonesian Middle Class', *Journal of Linguistic Anthropology*, vol. 17, no. 2, h. 184–203.
- Sujarwo, P. J. (2008) *Pontianak 'Teenager' Under Cover: Benarkah Perilaku Remaja di Pontianak Sudah Sedemikian Mengerikan?*, Pijar Publishing, Pontianak.
- Tomasevski, K. (2003) *Education Denied: Costs and Remedies*, Zed Books, London.
- Utomo, I. D. & McDonald, P. (1997) 'Middle class young people and their parents in Jakarta: Generational differences in sexual attitudes and behaviour', *Journal of Population*, vol. 2, no. 2, pp. 169–201.
- UU No. 40 (2009) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan*.
- Wallach, J. (2002), *Modern Noise and Ethnic Accents: Indonesian Popular Music in the Era of Reformasi*, PhD Thesis, University of Pennsylvania, University Microfilms International, Ann Arbor, Michigan.
- Webster, T. W. (akan terbit) 'The ongoing culture debate: Youth and *pergaulan (bebas)* in Indonesia', akan terbit, *The Asia-Pacific Journal of Anthropology*.
- Wells, K. (2009) *Childhood in a Global Perspective*, Polity Press, Cambridge.
- White, B. & Margiyatin, C. U. (2009) 'Teenage experiences of school, work and life in a Javanese village: Kali Loro (Yogyakarta)', Paper presented at the Workshop on 'Growing Up in Indonesia: Experience and Diversity in Youth Transitions', ANU, Canberra, 28–20 September 2009.
- Willis, P. (1977) *Learning to Labour*, Gower, Aldershot.

World Bank (2006) *Development and the Next Generation: World Bank Report 2007*, The World Bank, Washington, DC.